

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu prioritas program pembangunan dibidang pendidikan. Dengan digulirnya desentralisasi pendidikan, maka pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah (pusat, provinsi dan kota/kabupaten) dan masyarakat. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun masih dihadapkan pada persoalan akses dan mutu pendidikan. Kedua persoalan tersebut masih memerlukan biaya yang sangat besar.

Pembiayaan untuk peningkatan mutu pembelajaran tergantung pada pada sumber daya pendidikan (kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, media pembelajaran, pembiayaan pendidikan) pada tingkat satuan pendidikan. Maka atas dasar tersebut dibutuhkan saluran dana yang berupa (subsidi pendidikan) untuk menunjang proses keberhasilan pendidikan¹.

Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah.

Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan maksimal².

¹ Pauzi, *Implementasi Pendidikan Bersubsidi untuk Madrasah dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, 2018, hlm 61

² Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Jurnal At-Ta'dib, Vol 8 No. 2,

Di dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya dan pembelanjaan. Biaya adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil³.

Kondisi pendidikan yang semakin jauh dari tujuan dan fungsinya dalam masyarakat tentu saja berdampak negatif pada sektor pembangunan nasional. Pemerintah Melalui instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1999 tentang wajib belajar pendidikan dasar, membuat terobosan besar dalam sejarah pendidikan yakni, mewajibkan masyarakat sekolah minimal hingga tingkat SLTP.

Konsekuensi kebijakan yang di kenal dengan istilah wajib belajar sembilan tahun ini dimana pemerintah menanggung semua biaya dalam penyelenggaraan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama. Akan tetapi setelah sekian lama di gambar gemborkan, bukannya gratis, biaya sekolah malah makin melambung. Jumlahnya banyak dan beragam, bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebelum kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini digulirkan.

Biaya SPP yang di hapus diganti dengan berbagai jenis pungutan baru bahkan, ada jenis biaya yang aneh seperti pensiun guru dan biaya kenang-kenangan. Jadi tidak ada sekolah gratis, semuanya harus bayar mulai dari seragam, buku, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Beragam biaya inilah yang mengganjal masyarakat untuk terus menyekolahkan anaknya. Malah porsi terbesar yang dikeluarkan oleh keluarga hanya dihabiskan untuk membayar kewajiban sekolah

yang dibebankan oleh sekolah.

Untuk itu mereka kerap mengorbankan kebutuhan primer lainnya seperti makan, baik kualitas maupun kuantitasnya, untuk memenuhi biaya 3 sekolah anaknya. Di sisi lain pihak sekolah tidak mau kompromi jika orang tua belum mampu memenuhi kewajibannya. Biasanya sanksi ditimpahkan kepada siswa, dengan cara mengucilkan atau menegur di depan kelas. Tapi cara yang paling umum dipakai adalah dengan menahan hak-hak siswa, seperti rapor atau ijazah⁴.

Mahalnya biaya pendidikan yang tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas secara signifikan, tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai orientasi pendidikan yang sebenarnya sedang ingin dicapai. Ironisnya, disaat beberapa negara tetangga terus berupaya keras melakukan peningkatan kualitas pada sektor pendidikan, banyak pihak di negara ini justru menempatkan pendidikan sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tak mengherankan bahwa ketika banyak pihak mengejar pendidikan dari sisi kuantitas, tentu menimbulkan berbagai macam konsekuensi logis seperti terabaikannya faktor kualitas pendidikan. Parahnya lagi, belakangan kita juga telah disadarkan bahwa banyak lulusan pendidikan formal tidak memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja⁵.

Banyaknya biaya yang dibebankan kepada orang tua murid menunjukkan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama masih menjadi impian. Sehingga walau berfikir sekolah itu penting akan tetapi karena biaya sangat mahal, orang tua siswa berfikir dua kali untuk melanjutkan sekolah anaknya. Mereka menganggap semakin tinggi level pendidikan semakin besar biaya yang harus di tanggung sehingga lebih memilih mendorong anaknya untuk bekerja atau menikah. Dengan berbagai permasalahan pendidikan

⁴ Novelia Nurcahya Musa, *Implementasi Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo* (studi kasus di SDN 20 Duingingi), skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018 hlm. 2

⁵ Laros Tuhuteru, *Pendidikan Politik: Kaum Muda Kontemporer* (Pasaman: Azka Pustaka 2022) hlm 160

yang ada, maka jelaslah sudah bahwa sistem pendidikan nasional yang ada saat ini belum mampu menjamin mutu pendidikan nasional⁶.

Dengan adanya dana subsidi pendidikan dari sekolah tersebut, maka biaya yang dibebankan kepada siswa dapat diringankan dalam hal ini berupa potongan iuran SPP yang berdasarkan klasifikasi tingkatan kelas masing-masing siswa yang berada di sekolah tersebut. Fase perkembangan pendidikan semakin menjadi tolak ukur berkembangnya negara Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa.

Pemerintah selalu berupaya untuk mensejahterakan warga negaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengimplementasikan paradigma pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan pendidikan gratis. Penerapan kebijakan pendidikan gratis ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pembiayaan lembaga pendidikan, karena pendidikan gratis memiliki arti dalam penyelenggaraan pendidikan yang tanpa mengikutsertakan orang tua dalam pembiayaan, khususnya untuk kebutuhan operasional sekolah.

Kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan di semua wilayah Indonesia bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar dua belas tahun yang sudah diprogram oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemerataan memperoleh kesempatan belajar, membantu meringankan biaya pendidikan dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan (finance education) di Indonesia menurut hasil tim peneliti dari Asian Development Bank, sumber pembiayaan berasal dari lembaga atau

⁶ Novelia Nurcahya Musa, *Implementasi Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo (studi kasus di SDN 20 Duingi)*, skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018 hlm. 2

departemen yang berperan penting yaitu Departemen Pendidikan, Departemen dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan dan Bappenas⁷.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45 Amandemen 2001) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan pendidikan dasar ini, diharapkan dirasakan dampak positifnya bagi perbaikan cara hidup setiap warga negara serta kualitas sumbangannya terhadap pembangunan, diharapkan pula dicapai kenaikan income percapita (pendapatan masyarakat), serta peningkatan kualitas hidup termasuk kesejahteraan intelektual.⁸

Pendidikan Dasar diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga untuk dapat: (a) hidup dengan layak di masyarakat dan (b) untuk melanjutkan pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan dasar diputuskan menjadi wajib belajar, maksudnya memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan⁹.

Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. Dampak dari COVID-19 menyebabkan rendahnya sentiment investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif.¹⁰

Tidak hanya itu saja, lambatnya ekonomi global khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke

⁷ Meyranti Iloe Lestari, *Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis di Pesantren*, Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 3 No. 3 (Juli 2019), hlm 115

⁸ UUD RI Amandemen Tahun 2001 Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara Indonesia dalam Pendidikan

⁹ Soedijarto, *Kajian pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2018) hlm 2

¹⁰ Dito Aditia Darma Nasution, *Dampak Pandemi Covid Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita (Juli 2020) hlm 212

China juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdasarkan analisis sensitivitas yang menjelaskan bahwa lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia¹¹.

SDIT Al-Fatihah merupakan salah satu sekolah yang berada di Bekasi Utara yang sudah dikenal sebagai sekolah yang mengadakan pembiayaan pendidikan bersubsidi. Secara langsung hal ini dapat membantu masyarakat dalam meringankan biaya pendidikan. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang diformulasikan ke dalam judul skripsi yaitu: “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersubsidi Di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi Utara”. Hal ini perlu diungkapkan agar dapat diketahui secara rinci mengenai pembiayaan pendidikan bersubsidi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas masalah difokuskan sebagai berikut:

- a) Mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat
- b) Banyaknya siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi
- c) Merosotnya perekonomian masyarakat sekitar karena dampak dari pandemi.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah agar penelitian lebih berfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dan hal itu dapat mempermudah proses Analisa penelitian yang dilakukan peneliti.

Adapun pembatasan masalah dalam pengamatan ini adalah penelitian ini dilakukan

¹¹ Iskandar Muda, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita (Juli 2020) hlm 212

berkaitan dengan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersubsidi di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi Utara. Tentang pelaksanaan perencanaan dan penatausahaan di sekolah tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas yang telah diuraikan maka rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersubsidi di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi Utara?
- 2) Apa saja syarat ketentuan agar bisa mendapatkan bantuan subsidi di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi Utara?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersubsidi di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi Utara?
- 4) Apakah manajemen pembiayaan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian atau penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersubsidi di SDIT Al-Fatihah Kota Bekasi Utara.
- b) Untuk mengetahui syarat ketentuan yang bisa mendapatkan bantuan subsidi.
- c) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat di sekolah

tersebut.

- d) Untuk mengetahui manajemen pembiayaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pola mekanisme pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diterapkan di sekolah serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam perspektif ekonomi di bidang pembiayaan khususnya bagi lingkungan masyarakat di Kota Bekasi Utara.

b) Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan mengenai pola mekanisme pembiayaan pendidikan, apakah pembiayaan bersubsidi dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kualitas siswa atau tidak.

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di SDIT Al-Fatihah Bekasi Utara. Sedangkan objek penelitian ini adalah manajemen pembiayaan pendidikan bersubsidi. Oleh karena itu, selain berdasarkan pada kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan

pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan¹².

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifudin yang berjudul Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam hasil dari penelitian ini adalah manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Global Madani Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam keadilan, kejujuran, amanah, transparansi dan akuntabilitas. Ini ditunjukkan adanya perbedaan antara golongan I dan II, guru sangat objektif kepada siswa, manajemen tidak pernah memberikan data yang fiktif dan laporan keuangan tersusun rapih. Tetapi dalam pembiayaan pendidikan SMP Global Madani belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena pembiayaan penuh dibebankan kepada siswa tanpa adanya bantuan dari pemerintah¹³.
- 3) Jurnal yang disusun oleh Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah yang berfokus pada tujuan untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah.

¹² Ahmad Munir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013)

¹³ Ahmad Saifudin, *Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah¹⁴.

- 4) Tesis yang ditulis oleh Muhammad Arifin yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Guru di SDIT Al-Hamidiyah Kota Depok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SDIT Al-Hamidiyah semua dibawah kendali direktorat keuangan yang prosesnya berangkat dari masing-masing program kegiatan yang akan dijalankan. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan pagu anggaran yang didasarkan pada proyeksi pemasukan dana dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tiap tahunnya. Proses evaluasi pembiayaan pendidikan di SDIT Al-Hamidiyah dilakukan dalam dua bentuk, pertama evaluasi pembiayaan secara umum yang dilakukan oleh divisi keuangan yayasan yang bertindak sebagai auditor internal. Evaluasi ini dilakukan setiap bulan, setiap satu semester dan setiap tahun ajaran yang mengacu pada laporan realisasi anggaran. Kedua adalah evaluasi tingkat operasional yaitu evaluasi program yang dilakukan oleh kepala sekolah setiap selesai program dijalankan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ)¹⁵.
- 5) Jurnal yang ditulis oleh Durotun Nafisah, Widiyanto dan Wijang Sakitri dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah pada jurnal ini*, mereka menjelaskan bahwa proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum

¹⁴ Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah*, Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. 23 No.2 2016

¹⁵ Muhammad Arifin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Guru di SDIT Al-Hamidiyah Kota Depok* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Kedungmutih dimuali dengan menjadikan RAPBM sebagai standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga publik, dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh MA Ribhul Ulum yaitu dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan, hingga pengesahan laporan pertanggungjawaban tersebut¹⁶.

- 6) Jurnal yang ditulis oleh Solehan yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Penggunaan dana efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif dari program pembiayaan yang melibatkan keputusan yang kritis dalam wilayah program pendidikan yang harus dibiayai, sistem pajak yang

¹⁶ Duron Nafisah, Widadanto dan Wijang Sakitri, *Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Aliyah*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Analisis Vol. 6 No.3 2017

digunakan untuk pembiayaan program, dan sistem alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan¹⁷.

- 7) Jurnal yang ditulis oleh Noor Fazariah Handayani dan Nadya Huda dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. Pada jurnal ini, mereka mengetahui evaluasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Kota Banjarmasin pada variable pelaksanaan anggaran pendidikan, pengelolaan anggaran dana pendidikan, penatausahaan keuangan pendidikan, dan pengawasan keuangan pendidikan berjalan efektif, sedangkan pada variable sistem penyusunan anggaran pendidikan berjalan cukup efektif. Secara umum manajemen pembiayaan pendidikan berjalan secara efektif dengan nilai sebesar 86,12%¹⁸.
- 8) Jurnal yang ditulis oleh Nurhayati dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal ini membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta jauh lebih baik. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal dan maksimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama¹⁹.

¹⁷ Solehan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Vol. 6 No.1 2022

¹⁸ Noor Fazariah Handayani dan Nadya Huda, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan*, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Vol. 3 No.4 2020

¹⁹ Nurhayati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 3 No 2 2022

- 9) Jurnal yang ditulis oleh Erviana Yulianti yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMP. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua dan komite sekolah. Pendataan itu digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan perencanaan finansial dibuat anggaran 1 tahun, pelaksanaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan RAPBS dan dilaporkan setiap tiga bulan, pemantauan dan evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala²⁰.
- 10) Jurnal yang ditulis oleh Nur Gamar dengan judul Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus MTS Darul Khair Masing Kecamatan Baitu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan pendidikan bersumber dari masyarakat umum, orang tua santri, dan donator tetap. Prosedur manajemen anggaran pendapatan pembiayaan pendidikan sudah dibuat dalam bentuk program pencapaian anggaran pendapatan. Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan MTS Darul Khair sudah sesuai dengan manajemen dan dilaksanakan pada akhir tahun. Pengawasan pembiayaan pendidikan MTS Darul Khair ditugaskan pada tim khusus yang bertugas mengawasi dan mengontrol keuangan. Tim yang terlibat dalam pengawas anggaran adalah masyarakat selaku orang tua²¹.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan bersubsidi di SDIT Al-Fatihah Bekasi Utara.

²⁰ Erviana Yulianti, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan* Vol. 11 No 4 2017

²¹ Nur Gamar, *Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus MTS Darul Khair Masing Kecamatan Baitu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah)*, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 7 No 1 2019